KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

Jalan Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125

Telepon (0771) 7333083, Faksimili (0771) 7333083

Laman : kepri.kemenkumham.go.id, surel : kanwilkepri@kemenkumham.go.id

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	RENCANA AKSI (adalah kegiatan yang selama ini menjadi permasalahan krusial dalam rangka pencapaian target output, dan sebagai upaya kualitas output sehingga berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi)		TIMELINE RENAKSI (TRIWULAN I / II / III / IV)
A	**BAGIAN UMUM DAN TU**							
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Rp 23,481,529,000	1. Perencanaan dan Organisasi	Melakukan Penyusunan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum	III dan IV
							Melakukan Monitoring Capaian RO pada setiap DIPA di Kanwil Hukum setiap triwulan, termasuk kendala dan alternatif solusi apabila tidak tercapai target RO yang telah ditetapkan	I, II, III, dan IV
							Sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan CRO didalam Sakti	I, II, III, dan IV
							Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai dengan besaran SBKU dan SBKK yang ditetapkan	I, II, III, dan IV
							Meningkatnya nilai SAKIP dengan melakukan pengukuran kinerja melalui monitoring pencapaian perjanjian kinerja	I, II, III, dan IV
							Meningkatnya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	I
							Pelaksanaan Manajemen Risiko	I, II, III, dan IV
						2. Keuangan	1. Melaksanakan perhitungan dan pembayaran gaji dan uang makan	I, II, III, dan IV
							2. Melaksanakan perhitungan dan pengajuan tunjangan kinerja	I, II, III, dan IV
							3. Melaksanakan Pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan yang berlaku	I, II, III, dan IV

							4. Memaksimalkan penyerapan anggaran dan capaian nilai IKPA	I, II, III, dan IV
							5. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan	I, II, III, dan IV
							6. Menyusun laporan keuangan	II, III dan IV
						3. Pengelolaan BMN	1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN	III
							2. Melakukan pembinaan dan pengelolaan BMN	II dan IV
							3.Melakukan Pengamanan BMN	II dan IV
							4. Melakukan penyusunan laporan BMN	II dan IV
						4. Sumber Daya Manusia	Melaksanakan Orientasi CPNS tahun 2024	I
							Melaksanakan penguatan Administrasi penilaian Kinerja SDM melalui e-Kinerja	I
							Melaksanakan Pengelolaan Administrasi SDM	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan pengembangan SDM	I, II, III, dan IV
							Mengelola pemberian penghargaan	III
							Supervisi dan bimbingan teknis sumber daya manusia	I, II, III, dan IV
						5. Humas dan TI	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah di Kantor Wilayah melalui publikasi ke media sosial maupun media cetak dan/atau media online	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan Keprotokolan pada kegiatan upacara atau kegiatan resmi lainnya serta kegiatan yang dihadiri pimpinan tinggi Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah	I
							Melaksanakan Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	II
							Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV

B	DIVISI PEMBETUKAN REGULASI							
1	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Rp 562,731,000		Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah	I
							Melaksanakan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	I, II, III, dan IV
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang			Melaksanakan pendalaman materi perancangan peraturan daerah dan penilaian Indeks Reformasi Hukum	IV
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Rp 133,835,000		Melaksanakan Analisa dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah atau Perkada	IV
			Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen			Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	IV
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Rp 1,093,814,000	Perencanaaan kegiatan	- menyusun SK Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengelolaan JDIH - rapat koordinasi pembinaan JDIH dengan JDIH Provinsi Kepulauan Riau	Triwulan 1
						Pengelolaan Anggota JDIH	Monitoring dan Evaluasi Kinerja 2 Anggota JDIH di Provinsi Kepulauan Riau	Triwulan 2
							Monitoring dan Evaluasi Kinerja 2 Anggota JDIH di Provinsi Kepulauan Riau	Triwulan 3
							Monitoring dan Evaluasi Kinerja 2 Anggota JDIH di Provinsi Kepulauan Riau	Triwulan 4
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%		Perencanaan Kegiatan	- Menyusun SK Panwasda - Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum Tahun 2025 - Sosialisasi Panwasda	Triwulan 1
						Pelaksanaan Bantuan Hukum	Verifikasi 22 Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	Triwulan 2
							Verifikasi 22 Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	Triwulan 3
							Verifikasi 22 Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	Triwulan 4
			Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%		Perencanaan Kegiatan	- Menyusun SK Panwasda - Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum Tahun 2025 - Sosialisasi Panwasda	Triwulan 1
						Pelaksanaan Bantuan Hukum	Verifikasi 3 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Triwulan 2
							Verifikasi 3 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Triwulan 3
							Verifikasi 2 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Triwulan 4

		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%		1. Pembinaan Desa Sadar Hukum Baru 2. Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan	1. Rapat penetapan usulan Kantor Wilayah terkait pembentukan binaan desa/kelurahan sadar hukum baru 2. Surat pemberitahuan ke Pemerintah Daerah (Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan) terkait pembentukan Posbankumdes	TW I
						Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan	Evaluasi desa/kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan (data dukung berupa SK Paralegal untuk Posbankumdes)	TW II
						Pembinaan Desa Sadar Hukum Baru	Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum baru (data dukung berupa kuesioner yang telah memenuhi kriteria, SK Kadarkum, SK Camat, dan SK Kabupaten/Kota)	TW III
						1. Pembinaan Desa Sadar Hukum Baru 2. Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan	1. Surat usulan ke BPHN terkait pembentukan Desa/Kelurahan sadar hukum yang baru 2. Laporan Evaluasi Desa/Kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan	TW IV
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp 387,497,000		1. Surat Keputusan tentang Tim Sekretariat Wilayah Indeks Reformasi Hukum Tahun Anggaran 2025 2. Surat Penyampaian kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk membentuk tim kerja dan tim asesor	I
							1. Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 2. Laporan Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	II
							Laporan partisipasi dan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	III
							Laporan evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di wilayah	IV
C	**DIVISI PELAYANAN HUKUM**							
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp 3,528,200,000		Melaksanakan penyebarluasan informasi layanan AHU melalui Sosialisasi Layanan Badan Usaha (Pencatatan PT Social Enterprise, PT Perorangan, Pencatatan dan Pendaftaran CV) dan melaksanakan Diseminasi Layanan Apostille	I dan II
							Melaksanakan penyebarluasan informasi layanan administrasi hukum umum melalui media sosial, brosur dan videotron	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan talkshow layanan administrasi hukum umum melalui media elektronik TV dan Radio	I, II, III, dan IV
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%			Melaksanakan Rakor Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Daerah Nortaris (MPDN)	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan rapat rutin Majelis Pengawas Notaris	I, II, III, dan IV

							Melaksanakan pembinaan notaris melalui pemeriksaan protokol Notaris	II dan III
							Menindaklajuti setiap laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran prilaku jabatan Notaris	I, II, III, dan IV
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Rp 2,090,916,000	Perencanaan dan Organisasi	Melaksanakan Pemantauan Pengawasan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan Pendampingan Penanganan Aduna/Pelanggaran Kekayaan Intelektual	I, II, III, dan IV
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		Perencanaan dan Organisasi	Melaksanakan penyebarluasan informasi layanan KI melalui Sosialisasi dan Diseminasi	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan penyebarluasan informasi layanan Kekayaan Intelektual melalui media sosial, brosur dan videotron	I, II, III, dan IV
							Melaksanakan talkshow layanan administrasi hukum umum melalui media elektronik TV dan Radio	I, II, III
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		Perencanaan dan Organisasi	Melaksanakan Pendampingan Pendaftaran Permohonan Kekayaan Intelektual	I, II, III, dan IV

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Edison Manik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi